



---

## ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL, KETERGANTUNGAN FISKAL DAN EFEKTIVITAS FISKAL PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2018-2022

Kumba Digdowiseiso<sup>1</sup>, Dhimas Kaliwattu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional

---

### History Article

---

#### Article history:

Received Feb 8, 2023

Approved Feb 25, 2023

---

#### Keywords:

*Fiscal Independence, Fiscal Dependence, Fiscal Effectiveness, First-Generation Theory*

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze Fiscal Independence, Fiscal Dependence and Fiscal Effectiveness of the D.I Yogyakarta Province in the 2018-2022 period. The research is quantitative descriptive by observing the posture of the provincial budget. In the aspect of fiscal independence, an average value of 36.7 is obtained, including the category towards independence. In the aspect of fiscal dependence, the value tends to be > 50 with an average percentage of 62.9 percent, including in the very high category. In the aspect of fiscal effectiveness, the figure obtained was 104.39 percent, including the category of very effective fiscal implementation in the region. Based on the review in this study, which found fluctuating changes from year to year, it justifies the influence of the First-Generation Theory that the central government's intervention to the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta still has a significant influence on regional fiscal independence, dependence and effectiveness.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta pada periode 2018-2022. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan pengamatan postur APBD Provinsi. Pada aspek kemandirian fiskal rata-rata diperoleh nilai 36,7 termasuk kategori menuju kemandirian. Pada aspek ketergantungan fiskal nilainya cenderung >50 dengan presentase rata-rata 62,9 persen termasuk kategori sangat tinggi. Pada aspek efektivitas fiskal angka yang diperoleh sebesar 104,39 persen termasuk kategori sangat efektif dalam pelaksanaan fiskal didaerahnya. Berdasarkan tinjauan dalam penelitian ini yang menemukan perubahan fluktuatif dari tahun ke tahun berikutnya membenarkan pengaruh First-Generation Theory bahwa intervensi pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi

---

---

Daerah Istimewa Yogyakarta masih ada pengaruh signifikan pada kemandirian, ketergantungan dan efektivitas fiskal daerah.

---

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

---

\*Corresponding author email: [kumba.digdo@civitas.unas.ac.id](mailto:kumba.digdo@civitas.unas.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Melalui kebijakan desentralisasi fiskal yang mulai dijalankan tahun 2001 penyerahan kewenangan kepada daerah dalam mengelola fiskal daerah di daerahnya telah dilakukan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

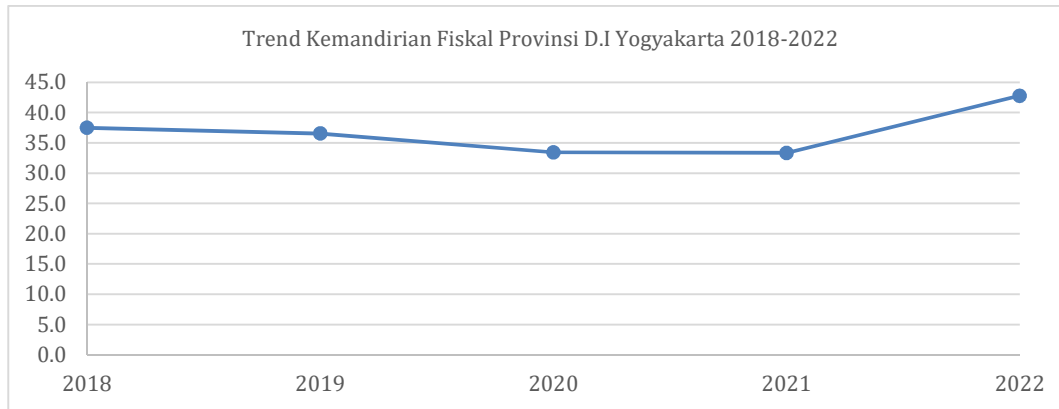
Di Indonesia tahap awal implementasi desentralisasi fiskal ditandai pada terjadinya peningkatan yang sangat besar pada dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 145,06% atau dari Rp 33,07 triliun (2000) menjadi Rp 81,05 triliun (2001). Dana transfer tersebut terus meningkat menjadi Rp 812,97 triliun (2019) dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,03% per tahun.

Badan Kebijakan Fiskal dalam laporan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia mencatat dalam dua dekade (2001-2020) sumber pendapatan utama daerah berasal dari dana transfer APBN dengan rata-rata 66,81% dari total pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut rasio intervensi pemerintah pusat terlihat masih lebih kuat dalam implementasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain sebagai dampak desentralisasi fiskal dalam perluasan pungutan pajak dan retribusi daerah pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari waktu ke waktu, yakni 15,16 Triliun (2001) dan pada titik tertingginya Rp 293,66 Triliun (2019) namun menurun di angka Rp 264,07 Triliun (2020) sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi karena Covid-19.

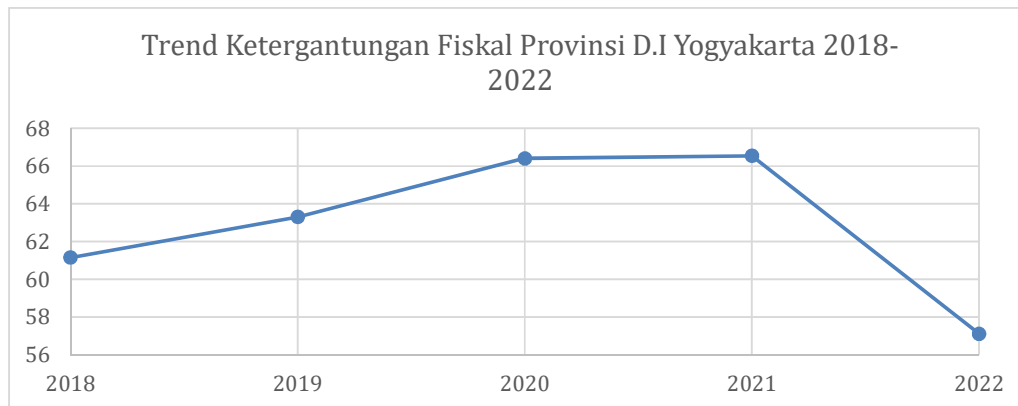
Provinsi D.I Yogyakarta salah satu dari mayoritas daerah di Indonesia yang belum memiliki kemandirian fiskal daerah secara penuh. Ekowati (2013) menemukan tahun 2006 hingga 2010 Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta masih memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi kepada pemerintah pusat rata-rata di bawah 10,10%.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 juga terlihat belum bisa menjadi daerah yang memiliki kemandirian fiskal secara penuh. Tingkat kemandirian fiskal berada di < 50 yang artinya baru mulai menuju mandiri sehingga pemerintah pusat masih memiliki intervensi melalui pola hubungan konsultatif.



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2023)

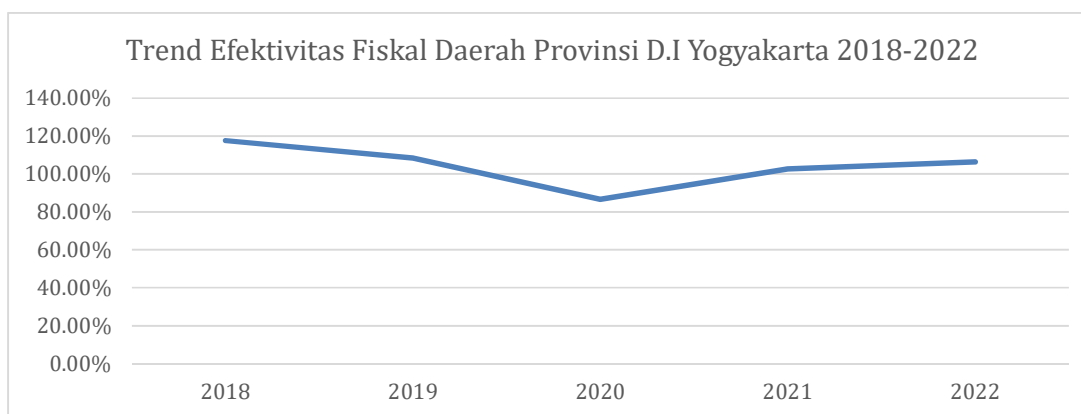
Pada tinjauan aspek ketergantungan fiskal di Provinsi D.I Yogyakarta juga didapati presentase nilai sangat tinggi dengan *trend* ketergantungan yang cenderung meningkat. Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus seharusnya Provinsi D.I Yogyakarta tidak boleh terlalu bergantung pada dana perimbangan dan otsus. Menurut Fatikah (2001) pengoptimalan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan bagi kemandirian keuangan daerah baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2023)

Masih tingginya Provinsi D.I Yogyakarta dalam ketergantungan fiskalnya dapat diamati dari perjalanan *trend* ketergantungan fiskalnya pada periode lima tahunan. Pada tahun 2020 dan 2021 berada di atas 66 persen. Tentu ini merupakan tantangan bagi daerah tersebut untuk lebih proaktif mengurangi ketergantungan fiskalnya.

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (EKD) menggambarkan kemampuan sebuah pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi EKD menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. EKD Provinsi D.I Yogyakarta pada periode ini berhasil mencapai target PAD bahkan melebihi sehingga realisasi penerimaan PAD sangat efektif, kecuali tahun 2020 dimana tingkat ketercapaian realisasinya 86,73 persen.



**Sumber:** DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2023)

Semakin besar tingkat EKD yang dikelola akan berdampak pada kontribusi daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu EKD juga dapat dilihat sebagai kinerja efektif perangkat pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan dan merealisasikan pendapatan asli daerah yang harus tumbuh dari waktu ke waktu sehingga mendorong inisiatif daerah untuk terus membangun sumber-sumber PAD berdasarkan potensi daerah yang dipungut dengan bentuk-bentuk inovatif sesuai dengan peraturan dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengambilan data APBD Provinsi di tahun tersebut dan data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan yang di publish. Penelitian yang akan dilakukan berbentuk deskriptif kuantitatif yang bertujuan bisa mendeskripsikan secara sistematis terkait fakta yang ada.

Penulis ingin membagi analisis keuangan Pemerintah Provinsi Yogyakarta Tahun 2022 dengan uraian: (1) Menghitung Kemandirian Fiskal; (2) Menghitung Tingkat Ketergantungan Fiskal; dan (3) Menghitung Efektivitas Fiskal dengan rasio dan penjabaran sebagai berikut;

### **Kemandirian Fiskal**

Kemandirian Fiskal menjelaskan nilai indeks bervariasi dari 0 (Semua pengeluaran dibiayai dari transfer serta tidak ada peran dari PAD), dan angka 100 (Semua pengeluaran dibiayai oleh PAD dan peran transfer tidak ada). Maka jika perolehan nilai rendah berarti belum mandiri dan membentuk pola hubungan instruktif, sebaliknya jika perolehan nilai semakin tinggi berarti dalam tahap menuju mandiri atau tinggi merupakan tingkat sangat mandiri dengan membentuk pola hubungan delegatif. Formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$$RKF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 1.** Klasifikasi Kemandirian Fiskal

Kemampuan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Belum Mandiri	0 – 25	Instruktif
Menuju Mandiri	25 – 50	Konsultatif
Mandiri	50 – 75	Partisipatif
Sangat Mandiri	75 – 100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2007

### Ketertanggung Fiskal

Ketertanggung Fiskal diformulasikan dengan cara membandingkan tingkat penerimaan dana negara (transfer) dengan total PAD. Formulasi perhitungan untuk menghitung rasio ketertanggung fiskal keuangan pemda sebagai berikut (Mahmudi, 2010).

$$RKF = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.** Klasifikasi Ketertanggung Fiskal

No	Nilai KF	Keterangan
1	<10,00	Sangat Rendah
2	10,00 – 20,00	Rendah
3	20,00 – 30,00	Sedang
4	30,00 – 40,00	Cukup
5	40,00 – 50,00	Tinggi
6	> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Mahmudi, 2010

### Efektivitas Fiskal

Efektivitas Fiskal berhubungan antar hasil yang diharapkan dengan apa yang ingin dicapai. Jika PAD menunjukkan kemampuan pemda dalam merealisasi targetnya akan berdampak pada hasil yang dicapai, semakin besar hasil yang diperoleh maka besar tingkat efektivitasnya, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil yang diperoleh maka kecil tingkat efektivitasnya. Berikut formulasi perhitungan fiskal:

$$REF = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Table 3.** Klasifikasi Efektivitas Fiskal

No	Nilai EF (%)	Keterangan
1	< 75	Tidak Efektif
2	75 – 89	Kurang Efektif
3	90 – 99	Cukup Efektif
4	100	Efektif
5	>100	Sangat Efektif

Sumber : Mahmudi (2010)

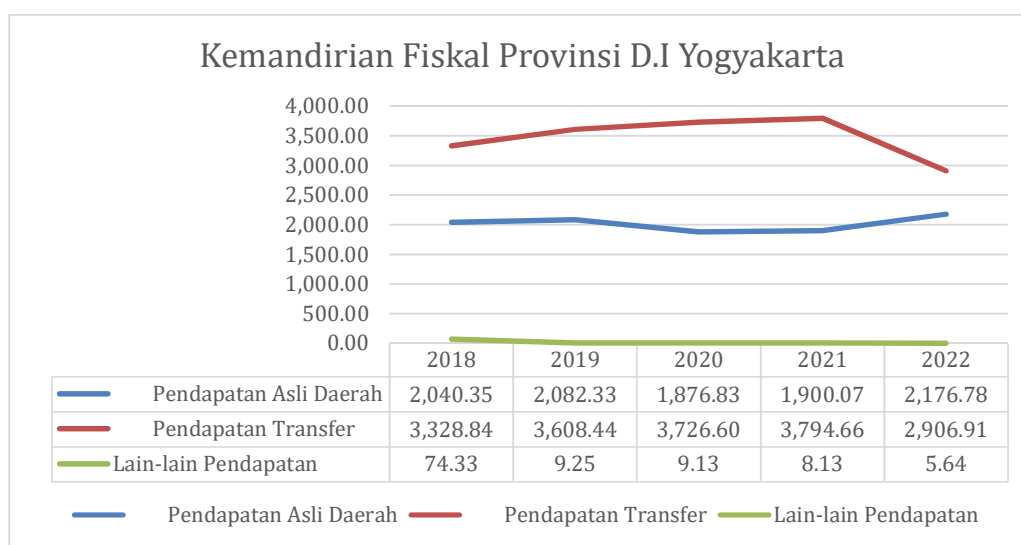
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Pemprov D.I Yogyakarta dalam mengelola tingkat kemandirian, ketergantungan dan seberapa efektif fiskal daerahnya. Penggunaan data dalam penelitian ini berdasarkan postur APBD D.I Yogyakarta selama periode tersebut.

Penggunaan data di penelitian ini berupa data sekunder postur APBD Provinsi D.I Yogyakarta, yang diakses melalui *website* DJPK Kemenkeu yang di *publish*. Untuk menganalisa tingkat Kemandirian, Ketergantungan dan Efektivitas Fiskal maka peneliti melakukan perhitungan terhadap seluruh variabel yang diuraikan sebagai berikut:

### Kemandirian Fiskal

**Grafik 1.** Kemandirian Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 (Dalam Miliar)



**Sumber:** DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan Kemandirian Fiskal pada Grafik 1, PAD Provinsi D.I Yogyakarta 2018-2022 terjadi perubahan yang cukup dinamis namun stabil. Pada tahun 2019 PAD Provinsi D.I Yogyakarta berada di 2,08 Triliun, naik 42 Miliar dari tahun sebelumnya. Terjadi penurunan PAD pada tahun 2020 sebesar 206 Miliar yang kemungkinan besar diakibatkan dari penurunan aktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan akibat covid-19.

Dalam penyeimbangan fiskal dana transfer pemerintah pusat pada tahun 2018-2021 terjadi peningkatan dari 3,3 Triliun (2018) menjadi 3,7 Triliun (2021) diikuti dengan *trend* penurunan pendapatan pada pos lain-lain pendapatan daerah. Paling besar dapat dibaca pada tahun 2018 yakni sebesar 74,33 Miliar yang 99 persennya berasal dari dana hibah. Berlanjut pada tahun 2022 dimana dapat diamati terjadi kenaikan PAD menjadi 2,17 Triliun sekaligus penurunan dana transfer menjadi 2,9 Triliun.

**Tabel 4.** Perhitungan Kemandirian Fiskal (PFK) Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2018-2022 (Dalam Milliar)

Tahun	PAD	Dana TF	Lain-lain Pendapatan	Rasio KF
2018	2.040,35	3.328,84	74,33	37,5
2019	2.082,33	3.608,44	9,25	36,5
2020	1.876,83	3.726,60	9,13	33,4
2021	1.900,07	3.794,66	8,13	33,3
2022	2.176,78	2.906,91	5,64	42,8
Rata-rata Kemandirian Fiskal (RRKF)				36,7

Sumber: Diolah

Jika melihat hasil perhitungan tabel 4 di atas, perjalanan kemandirian fiskal Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2018 berkisar 37,5 dengan menurun ke angka 36,5 (2019), menurun ke angka 33,4 (2020), kembali menurun ke angka 33,3 (2021), dan meningkat di angka 42,8 (2022).

Ditinjau dari kemandirian fiskal Provinsi D.I Yogyakarta secara rata-rata berada pada posisi 36,7 secara rasio ini menunjukkan Indeks Kemandirian Fiskal dikategorikan menuju kemandirian. Berdasarkan pola hubungan berada pada pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah.

### Ketergantungan Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan Ketergantungan Fiskal pada grafik 2, dapat dilihat gerak total pendapatan daerah cenderung mengikuti pola pendapatan transfer yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**Grafik 2.** Ketergantungan Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2018-2022 (dalam miliar)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan transfer daerah sebesar 280 Miliar dan terus meningkat hingga menjadi 3,7 Triliun atau jumlah dana transfer meningkat 34 Miliar pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 menjadi 3,7 Triliun atau meningkat 68 Miliar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dapat dilihat terjadi penurunan dana transfer yang sangat signifikan sebesar 888 Miliar dan menyebabkan terjadinya penurunan pada total pendapatan daerah.

**Tabel 5.** Perhitungan Ketergantungan Fiskal (PFK) Provinsi D.I Yogyakarta

Tahun	Pendapatan transfer	PAD	Rasio KF (%)
2018	3.328,84	2.040,35	61,5 %
2019	3.608,44	2.082,33	63,3 %
2020	3.726,6	1.876,83	66,4 %
2021	3.794,66	1.900,07	66,5 %
2022	2.906,91	2.176,78	57,1%
Rata-rata Ketergantungan Fiskal (RRKF)			62,9 %

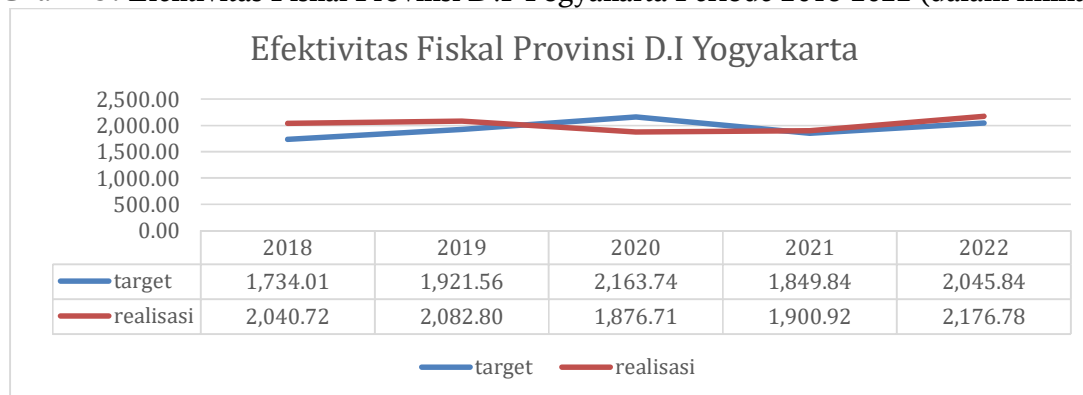
Sumber: Data diolah

Perubahan rasio ketergantungan fiskal Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 mengalami perubahan fluktuatif atau tidak bisa dikatakan stabil. Berdasarkan table 5 rasio ketergantungan fiskal dalam lima tahun terakhir masih berada di atas > 50 persen, artinya tingkat ketergantungan Provinsi D.I Yogyakarta masih sangat tinggi. Periode tertinggi berada pada tahun 2010-2021 yang mencapai diatas 66 persen.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan PAD Provinsi D.I Yogyakarta menjadi 2,1 Triliun yang diikuti dengan pendapatan transfer yang menurun dari 7,7 Triliun menjadi 2,9 Triliun sehingga menurunkan rasio ketergantungan fiskal berada diangka 57,1 persen. Namun berdasarkan kategorisasi Provinsi D.I Yogyakarta tetap masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dalam fiskal daerah.

**Efektivitas Fiskal**

**Grafik 3.** Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2018-2022 (dalam miliar)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data Diolah 2023



Berdasarkan perhitungan efektivitas fiskal pada grafik 3 dapat diamati realisasi fiskal Provinsi D.I Yogyakarta selalu melebihi target PAD ditahun berjalan kecuali pada tahun 2020 dimana realisasi penerimaan PAD Provinsi D.I Yogyakarta dibawah target yang harus dicapai. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PAD hanya 86,73 persen.

Pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan jumlah dan realisasi penerimaan PAD sekitar 82 Miliar, sedangkan pada periode 2021-2022 peningkatan jumlahnya mencapai 276 Miliar. Periode ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Efektivitas fiskal Provinsi D.I Yogyakarta dalam lima tahun terakhir dalam rata-rata berada diangka 104,39 persen secara katagori sangat efektif. Artinya kinerja perangkat daerah Provinsi D.I Yogyakarta baik karena berhasil melampaui target PAD yang ditetapkan yang tentunya terus meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 6.** Perhitungan Efektivitas Fiskal (PEF) Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2018-2022 (dalam miliar)

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio EF (%)
2018	1.734,01	2.040,72	117,69%
2019	1.921,56	2.082,80	108,39%
2020	2.163,74	1.876,71	86,73%
2021	1.849,84	1.900,92	102,76%
2022	2.045,84	2.176,78	106,40%

Sumber: Data Diolah

## KESIMPULAN

Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Efektivitas Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 dari pembahasan diatas menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. PAD Provinsi D.I Yogyakarta 2018-2022 berjalan cukup dinamis namun cenderung stabil. Kemandirian fiskal Provinsi D.I Yogyakarta secara rata-rata berada pada posisi 36,7 secara rasio ini menunjukkan Indeks Kemandirian Fiskal dikategorikan menuju kemandirian.
2. Gerak total pendapatan daerah D.I Yogyakarta 2018-2022 cenderung mengikuti pola pendapatan dana transfer. Perubahan rasio ketergantungan fiskal berubah fluktuatif atau tidak bisa dikatakan stabil. Rasio ketergantungan fiskal dalam lima tahun terakhir masih berada di atas > 50 persen, artinya tingkat ketergantungan fiskal Provinsi D.I Yogyakarta masih sangat tinggi
3. Realisasi fiskal Provinsi D.I Yogyakarta dalam lima tahun terakhir rata-rata selalu mencapai target PAD bahkan dapat melampaui. Efektivitas fiskal Provinsi D.I Yogyakarta dalam lima tahun terakhir sangat efektif.
4. Hasil perhitungan aspek Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal menunjukkan adanya pengaruh First-Generation Theory yang dapat disimpulkan intervensi pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.I Yogyakarta pada periode 2018-2022 masih ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah”, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Ahmad Taufik. (2021). Analisis Kesehatan Keuangan Daerah Kabupaten Kota Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016-2019, Universitas Nasional

- Andi. Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat
- Arif Budianto. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020, Diskominfo Kab Magelang.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Digdowiseiso, K. (2015). Sistem Keuangan Publik. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Digdowiseiso, K. (2021) Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022. Universitas Nasional
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, strategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga.
- Lia Ekowati. (2013). Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta.
- Oates, W.E. Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. Int Tax Public Finan 12, 349–373 (2005). <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
- Oates, Wallace, E. 1999. "An Essay on Fiscal Federalism." Journal of Economic Literature, 37 (3): 1120-1149.DOI: 10.1257/jel.37.3.1120
- Portal Data SIKD, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rosiana. (2021). *Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Prosiding Senama. Universitas Ahmad Dahlan
- Saadillah, Lala Fatikah. (2021). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal (studi empiris pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2015-2018)*. Sarjana Thesis. Universitas Muria Kudus. Kudus.